

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
KELAYAKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG**

Vencensius Dimas T, Ida Hayu
Jurusan Administasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

ABSTRACT

Transportation is a necessity for the people to support their activities should be comfortable and safe. Every vehicle that being used must be comfortable and safe so any vehicle that operates for goods transport or public transportation should do a feasibility test. Feasibility test that performed by the Dinas Perhubungan must test the car every six months. In fact there are still many vehicles that are not safe enough in the roads are still being used, this may be a danger for the drivers and the people around the vehicle. Because of many vehicles that are not good enough to used, researchers want to see how Dinas Perhubungan supervise the feasibility test vehicle in the city of Semarang, and the obstacles that being faced and the efforts of Dinas Perhubungan in increasing the supervision. The research method that will be used is qualitative descriptive to describe how the supervision made by Dinas Perhubungan and as a research instrument the researcher uses standard, measuring activity, comparison and correction action. The results showed that supervision conducted by Dinas Perhubungan experience some obstacles such as human resources and equipment that is still manual. The advice given is the need for the addition of the number of human resources and the replacement of computerized testing tools.

Keywords: Supervision , Feasibility Test , Human Resources , Tools

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting . Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia memerlukan transportasi . Transportasi terbagi menjadi 3 yaitu transportasi darat , laut dan udara . Rustian Kamaluddin (2003 : 3) transportasi

adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi memegang peranan penting karena perkembangan masyarakat atau daerah tergantung dengan perkembangan transportasi atau sebaliknya .Semarang merupakan kota besar . Kota Semarang mempunyai peran yang strategis dan terletak pada simpul jalur penghubung

utama antara jalur jalan sepanjang Pantai Utara dan jalur jalan sepanjang Pantai Selatan yaitu jalur Semarang – Yogyakarta . Keuntungan lokasi ini menjadikan Semarang akan terus berkembang sebagai simpul jasa dan distribusi serta pintu gerbang menuju wilayah - wilayah lainnya. Perkembangan transportasi yang terjadi di kota Semarang harus di imbangi dengan pengawasan . Agar perkembangan transportasi di kota Semarang tidak hanya berkembang seadanya namun juga harus berkembang dengan baik dan bijak.

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki beberapa misi dan sala satu misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor . Namun peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Perhubungan masih ada kekurangan dengan masih banyaknya kendaraan bermotor yang seharusnya melakukan uji kelayakan tidak melakukan uji kelayakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kendaraan tersebut masih digunakan pemilik untuk beraktivitas .

Kendaraan yang tidak layak dapat dilihat dari kondisi kendaraan itu sendiri dan fungsi – fungsi yang ada didalam kendaraan seperti fungsi lampu dan fungsi rem . Kendaraan – kendaraan yang tidak layak tersebut jika ada operasi layak jalan akan dilakukan penilngan oleh Dinas Perhubungan karena dapat membahayakan

pengendara kendaraan itu sendiri dan pengguna jalan yang lain .

Banyaknya kendaraan yang tidak layak di kendarai masih banyak di jalan bisa menjadi indikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan . Pengawasan yang kurang ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kecelakaan yang diakibatkan dari kendaraan yang tidak layak jalan masih beroperasi .

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait kelayakan kendaraan bermotor di Kota Semarang ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang ?
3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pengawasan kelayakan kendaraan bermotor di Kota Semarang ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait kelayakan kendaraan bermotor di Kota Semarang
2. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengawasan

yang di lakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang

3. Mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam peningkatan pengawasan kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang

KAJIAN TEORI

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dasar dan penting untuk menentukan keberhasilan manajemen mencapai tujuan dengan melalui orang lain . Siagian (2005 : 125) Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya . Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik maka di dalam pengawasan memiliki indikator proses

pengawasan menurut Mufham 2006 : 89 sebagai berikut :

- a. Penetapan standar
Penentuan standar harus dilakukan sebelum mengadakan evaluasi hasil pengawasan .
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun secara tertulis , buku catatan , inspeksi atau pengawasan langsung atau dengan alat – alat teknis
- c. Melakukan perbandingan
Membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar
- d. Tindakan Koreksi
Tahap terakhir dalam proses pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dapat berubah sewaktu – waktu, perubahan tersebut dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor - faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Perubahan dari luar maupun dalam organisasi
- b. Kompleksitas organisasi yang selalu memerlukan pengawasan karena adanya desentralisasi kekuasaan
- c. Kesalahan yang di lakukan anggota organisasi

Perubahan pengawasan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan untuk meneliti perubahan pada pengawasan dari dalam organisasi .

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan pengawasan di Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang kelayakan kendaraan bermotor . Sumber data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder . Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan purposive .

Analisis Penelitian

Tahap analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitian . Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation proses memilih , menyederhanakan , mengabstrakkan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara dan dokumen-dokumen . Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

Kualitas Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas . Uji kredibilitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, menggunakan *member check*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengawasan memiliki 4 indikator yaitu standar, pengukuran kegiatan , melakukan perbandingan dan tindakan koreksi . Indikator tersebut dapat melihat bagaimana suatu pengawasan berjalan . Indikator yang pertama adalah :

Standar

Penetapan standar didalam pengawasan berguna sebagai dasar agar pengawasan yang dijalankan memiliki acuan . Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menjalankan pengawasan kelayakan kendaraan bermotor di Kota Semarang menggunakan beberapa peraturan yang saling berkaitan dan melengkapi . Standar regulasi yang di jadikan pedoman oleh Dinas Perhubungan yaitu Peraturan Menteri No 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala , Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan Perda No 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota semarang .

Pengawasan tidak akan lepas dari adanya keterlibatan individu – individu yang menjalankan pengawasan tersebut .

Individu yang bekerja menjalankan pengawasan pasti akan selalu berpedoman dengan standar yang telah ditentukan . Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan pihak yang ikut terlibat pihak tersebut terbagi menjadi 2 yaitu pihak intern dan ekstern . Pihak intern yang terlibat dalam pengawasan ini adalah para pegawai di Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya pada bidang pengelolaan dan sarana transportasi dan untuk pihak ekstern yang terlibat dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor adalah kepolisian . Pengawasan tidak hanya membutuhkan standar sebagai pedoman namun di dalam pengawasan juga membutuhkan kejelasan prosedur . Kejelasan prosedur dalam pengawasan dapat mempermudah para individu untuk menjalankan pengawasan dan juga mempermudah perbaikan jika terjadi kekurangan atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses pengawasan . Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan memiliki SOP . SOP yang dimiliki Dinas Perhubungan terbagi menjadi 2 yaitu SOP teknis dan SOP administrasi . Pengawasan berjalan tidak hanya dengan individu – individu saja yang bekerja namun ada juga sarana dan prasarana yang mendukung individu – individu tersebut dalam bekerja . Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki

sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor alat yang dimiliki selalu mendapatkan perawatan dan setiap tahun selalu di anggarkan untuk pembaruan alat agar alat yang di pakai dalam pengujian berkala kendaraan bermotor selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada . Dalam pengukuran kegiatan ini terdapat jumlah petugas yang ikut terlibat dalam pengawasan karena pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya petugas yang menjalankan dengan adanya petugas atau pihak yang terkait maka perlu adanya frekuensi waktu di dalam pengawasan yang dilakukan agar pengawasan tersebut tidak dilakukan dengan percuma dan hanya membuang - buang waktu saja . Kemudian ada bentuk pelaporan saat pengawasan harus jelas dan keakuratan informasi yang diterima baik sesuai standar

Pengkuran kegiatan

Dalam pengukuran kegiatan ini terdapat jumlah petugas yang ikut terlibat sebanyak 59 petugas yang di bagi menjadi 2 bidang ada yang bekerja pada bidang administrasi dan ada yang bekerja pada bidang teknis . Untuk petugas yang bekerja pada bidang teknis memiliki kompetensi khusus pada bidang uji kelayakan kendaraan bermotor .Frekuensi kegiatan pengawasan yang

dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap uji kelayakan kendaraan bermotor ini terus berlangsung dengan adanya uji berkala tiap 6 bulan sekali . Pada saat uji berkala 6 bulan sekali tersebut dapat diketahui apakah kendaraan tersebut masih layak atau tidak . Selain kegiatan pengawasan setiap 6 bulan sekali yang dilakukan dalam gedung pengujian tersebut Dinas Perhubungan juga rutin melaksanakan operasi uji kelayakan kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan untuk tempat operasi dilakukan secara acak dan berpindah – pindah tempat . Objektivitas dan keakuratan informasi yang diterima Dinas Perhubungan dalam bentuk buku kir . Buku kir ini memuat identitas kendaraan yang wajib melakukan uji kelayakan jalan . Data yang berada didalam buku kir ini tidak dapat dirubah sendiri oleh pemilik kendaraan karena jika data telah dirubah sendiri oleh pemilik kendaraan maka saat uji berkala data yang telah dirubah tersebut tidak akan cocok dengan data kendaraan yang telah dimiliki Dinas Perhubungan . Tingkat pelanggaran yang sering terjadi adalah buku kir mati kemudian tidak di ujikan berkala dalam jangka waktu yang lama dan ada juga pelanggaran telat uji KIR . Untuk pelanggaran telat uji hanya akan diberi sangsi , pemberian sangsi tersebut juga melihat kondisi kendaraan apakah masih layak atau tidak layak . Jika

didapati telat buku KIR dengan kondisi kendaraan yang tidak layak maka akan di minta untuk perbaikan terlebih dahulu .

Jika ditemui pelanggaran buku kir mati dalam waktu yang lama maka kendaraan tersebut jika ingin melakukan uji KIR kembali harus diberi nomor uji berkala yang baru meskipun kendaraan tersebut telah memiliki nomor uji berkala . Untuk kendala yaitu masih kurangnya jumlah personil dalam pengawasan dan peralatan yang digunakan masih manual belum komputerisasi sehingga membutuhkan waktu dalam pengoperasiaannya .

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan saat menentukan sesuai standar atau tidak sesuai standar uji kelayakan kendaraan ini terjadi dalam proses pengujian jadi kendaraan yang sesuai standar akan lolos uji dan kembali lagi pada tanggal yang telah ditentukan setiap 6 bulan sekali . Kemudian untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan standar harus ada pembetulan sesuai dengan standar dan kembali lagi setelah kendaraan tersebut telah sesuai dengan standar uji kelayakan kendaraan . Untuk perbandingan Dinas Perhubungan langsung melihat jumlah total kendaraan yang telah melakukan uji kelayakan kendaraan tiap tahunnya .

Melakukan perbandingan

Mengukur dan menilai keberhasilan dari pengawasan uji kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat jika saat melakukan operasi yang melakukan pelanggaran sedikit maka dapat disimpulkan kendaraan wajib uji di Kota Semarang telah melakukan Uji KIR . Pengukuran juga dilakukan dengan melihat jumlah banyaknya yang melakukan uji kir setiap tahunnya

Pada tahun 2013 jumlah kendaraan yang telah melakukan uji sebanyak 81229 kemudian pada tahun 2014 jumlah kendaraan yang uji meningkat menjadi 91573 selanjutnya pada tahun 2014 kendaraan yang di uji meningkat menjadi 92661 . Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka kendaraan yang di ujikan karena banyak pemilik kendaraan yang melakukan numpang uji keluar dan mutasi . tahapan terakhir dalam pengawasan merupakan tindakan koreksi ini berguna untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengawasan yang telah dilakukan . Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan maka hambatan – hambatan yang muncul dapat cepat tertangani .

Tindakan koreksi

Dalam tahap pengawasan tindakan koreksi ini merupakan tahap akhir dan penting dalam proses pengawasan . Jika ditemui pelanggaran yang berat dan tidak dapat di

toleransi lagi maka kendaraan tersebut tidak akan lolos uji dan di kembalikan ke pemilik untuk di perbaiki terlebih dahulu dan kembali lagi untuk menguji KIR setelah kendaraan tersebut di perbaiki . Untuk pelanggaran yang terjadi ketika operasi layak jalan biasanya Dinas Perhubungan akan melakukan penilangan buku KIR .

Untuk peningkatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang berupaya untuk memperbaharui alat teknis yang dimiliki agar dapat mengikuti perkembangan zaman , meningkatkan kualitas penguji agar dapat mengawasi dengan lebih baik , berupaya untuk menambah personil dan kendaraan

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang terkait dengan uji kelayakan kendaraan di mulai dengan adanya standar , pengukuran kegiatan , melakukan perbandingan dan tindakan koreksi . Standar yang digunakan Dinas Perhubungan dalam pengawasan kelayakan kendaraan adalah Peraturan Menteri No 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor , Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan , Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah No

2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang . Untuk pihak yang terlibat dalam pengawasan ada pihak internal dari Dinas Perhubungan dan untuk pihak ekstern ada kepolisian . Pengawasan dilakukan dengan adanya kejelasan prosedur . Kejelasan prosedur tersebut berupa adanya SOP . SOP ini berguna untuk individu – individu agar mudah dalam menjalankan pengawasan . SOP yang ada yaitu SOP administrasi dan SOP teknis .

Dalam pengukuran kegiatan terdapat gejala yang diteliti yaitu Jumlah petugas dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan memiliki 59 petugas. Petugas yang berjumlah 59 petugas tersebut terbagi kedalam 2 bidang yaitu bidang administratif dan bidang teknis

Frekuensi pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait uji kelayakan kendaraan ini selalu berlangsung berulang karena kendaraan yang wajib KIR harus kembali KIR setiap 6 bulan sekali jadi KIR tidak hanya dilakukan sekali setelah kendaraan tersebut di beli namun berkelanjutan selama kendaraan tersebut ada . Dinas Perhubungan juga selalu mengadakan operasi layak jalan setiap 1 minggu sekali yang di lakukan secara acak atau dengan berpindah – pindah tempat

Dalam pengawasan ada pelaporan . Laporan tersebut harus objektifitas dan keakuratan informasi yang diterima oleh Dinas Perhubungan tentang uji kelayakan kendaraan akan selalu terjaga karena setiap kendaraan yang wajib uji telah memiliki buku KIR sebagai bentuk pengawasan . Pelanggaran yang masih sering terjadi adalah buku kir mati dan tidak di ujikan kembali . Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya SDM yang mengganggu dan penggunaan alat manual masih sedikit mengganggu pekerjaan .

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan perbandingan untuk melakukan perbandingan makan peneliti menggunakan gejala mengukur dan menilai tingkat keberhasilan dari pengawasan uji kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat jika saat melakukan operasi yang melakukan pelanggaran sedikit maka dapat disimpulkan kendaraan wajib uji di Kota Semarang telah melakukan Uji KIR . Peningkatan kendaraan wajib uji tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait uji kelayakaan berjalan dengan baik . Pada penelitian ini peneliti melakukan perbandingan dengan langsung melihat berapa jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kelayakan setiap tahunnya dari data yang di dapatkan dari Dinas Perhubungan .

Untuk tahapan yang terakhir dalam pengawasan yaitu tindakan koreksi . Pada tindakan koreksi ini peneliti menggunakan gejala – gejala seperti tindak lanjut jika terjadi pelanggaran yang berat dan tidak dapat di tolerasi lagi maka kendaraan tersebut tidak akan lolos uji dan di kembalikan ke pemilik untuk di perbaiki terlebih dahulu dan kembali lagi untuk menguji KIR setelah kendaraan tersebut di perbaiki . Peningkatan dalam pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar pengawasan selalu berjalan dengan baik . Upaya yang dilakukan adalah berupaya untuk memperbaharui alat teknis yang dimiliki agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan berupaya untuk menambah personil dan kendaraan

Faktor Penghambat Pengawasan

- a. Kurangnya SDM yang ada dalam pengujian
- b. Peralatan yang sudah ada lengkap namun belum komputerisasi masih manual sehingga butuh waktu dalam pengoperasiannya
- c. Untuk jam sibuk masih sering terjadi penumpukan pada administrasi

Faktor Pendukung Pengawasan

- a. Ketersediaan alat yang diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi

Upaya peningkatan Pengawasan

- a. Mengeluarkan inovasi yang dilakukan dengan membuka loket

KIR drive thru guna mempercepat proses administrasi

- b. Penambahan alat timbang portable guna pengawasan ketika operasi

SARAN

- a. Penambahan Jumlah SDM pada administrasi dan SDM pada teknis agar pada jam sibuk tidak terdapat penumpukan
- b. Peningkatan alat uji yang komputerisasi agar dapat mempercepat proses pengujian

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir.2011. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rajawali Pers
- Kamaluddin, Rustian., 2003, Ekonomi Transportasi (Karakteristik, Teori, dan Kebijakan), Ghalia Indonesia, Jakarta
- Keban, Yeremias T.2008 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* . Yogyakarta : Gava Media
- Matthew B Milles.A Michael Huberman, 2007, Analisis Data Kualitatif, UI Pres
- Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Remaja Rosda Karya

- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana : Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sondang P. Siagian. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajemen* edisi revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Ke-20. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan